

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara umum dapat diartikan sebagai satu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan, ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah suatu usaha perniagaan yang dikelola secara individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro (Prayatningrum & Astawa, 2022). Dalam hal ini UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam mempercepat perkembangan perekonomian serta memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga telah lama diakui sebagai motor penggerak ekonomi yang vital di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global dan perubahan pasar, peran UMKM semakin menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi, terutama dalam hal peningkatan ekonomi lokal, dimana sektor UMKM menyumbang lebih dari 60,5% PDB negara, menyerap 97% tenaga kerja, dan mencakup 64 juta atau 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia makin meningkat di tiap tahunnya terutama di tahun 2025, ini terlihat dari data dari Kementerian UMKM Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data UMKM di Indonesia Tahun 2025

| Keterangan | Jumlah |
|----------------|------------|
| Usaha Mikro | 30.199.928 |
| Usaha Kecil | 73.828 |
| Usaha Menengah | 15.313 |
| Total UMKM | 30.209.069 |

(Sumber: Kementerian UMKM Republik Indonesia, 2026)

Dari data diatas menandakan bahwa UMKM memiliki peran penting terhadap masyarakat di indonesia. Salah satu peran penting UMKM adalah dalam hal penyerapan tenaga kerja sehingga membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran. Berdasarkan data yang ada pada kementerian UMKM Republik Indonesia tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai angka 45.305.983 orang per tanggal 31 Desember 2025 dengan sebaran paling banyak ada di UMKM skala mikro.

Perkembangan UMKM sangatlah pesat di Indonesia, hampir seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh adanya UMKM sebagai penggerak perekonomian. Salah satu wilayah yang memiliki perkembangan UMKM yang pesat adalah di wilayah bali, yang dimana pada tahun 2023 memiliki jumlah UMKM sebesar 439.382 usaha baik formal maupun informal yang terletak di seluruh kabupatennya. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki peningkatan pertumbuhan UMKM yang sangat pesat, salah satunya adalah Kabupaten Buleleng yang memiliki jumlah UMKM dengan persentase peningkatan usaha sebesar 16% dibandingkan Tahun 2022 dengan jumlah usahanya sebanyak 57.216 usaha. Hal ini

yang menjadikan Buleleng sebagai salah satu kabupaten yang konsisten akan pertumbuhan UMKM di wilayahnya dibandingkan dengan kabupaten lain yang memiliki laju pertumbuhan UMKM tidak stabil pada tiap tahunnya.

Tabel 1. 2
Data UMKM Provinsi Bali Tahun 2023

| Kabupaten | Jumlah UMKM |
|------------|-------------|
| Gianyar | 75.666 |
| Jembrana | 67.183 |
| Buleleng | 66.368 |
| Karangasem | 50.717 |
| Tabanan | 47.957 |
| Bangli | 44.251 |
| Klungkung | 35.792 |
| Denpasar | 29.749 |
| Badung | 21.699 |

(Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, 2023)

Berdasarkan data, UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki perkembangan yang sangat terlihat, ini menandakan bahwa beberapa sektor yang ada di Kabupaten Buleleng terus berkembang. Perkembangan UMKM di wilayah Buleleng juga menandakan bahwa peluang menjalankan usaha sangatlah tinggi serta peluang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar juga sangatlah terbuka, ini menjadikan banyak masyarakat yang mencari peruntungan dengan membuka usahanya baik dalam lingkup yang kecil hingga besar. Salah satu sektor yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan UMKM di

Kabupaten Buleleng adalah pada sektor perdagangan dengan jumlah penyebaran usaha di sektor ini sebesar 18.357 jenis usaha di tahun 2024. Berikut adalah rincian data perkembangan usaha di Kabupaten Buleleng dari periode 2021-2024.

Tabel 1. 2
Perkembangan Jumlah UMKM Formal Kabupaten Buleleng

| Tahun | Sektor | | | | Jumlah |
|-------|-------------|---------------|-------------------------|------------|--------|
| | Perdagangan | Perindustrian | Pertanian Non Pertanian | Aneka Jasa | |
| 2021 | 9.013 | 653 | 746 | 499 | 10.911 |
| 2022 | 11.798 | 1.763 | 1.338 | 2.808 | 17.707 |
| 2023 | 15.925 | 4.129 | 2.218 | 7.807 | 30.079 |
| 2024 | 18.357 | 5.026 | 3.132 | 13.344 | 39.859 |

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, 2023)

Pada saat ini UMKM bukan hanya menjadi salah satu penggerak perekonomian lokal sekaligus juga sebagai penyedia lapangan kerja yang tinggi. Namun, saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi yang menyebabkan UMKM ini kesusahan dalam mengembangkan dan mengelola usahanya dengan lebih baik lagi. Tantangan yang dialami oleh pelaku UMKM ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi keuangan secara maksimal, kurangnya literasi keuangan, kurangnya modal yang dimiliki, dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ke beberapa pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Buleleng didapati bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak menggunakan keuangan digital karena kurangnya pemahaman dan modal terbatas yang mereka miliki, yang menyebabkan mereka harus mempertimbangkan adopsi akan teknologi keuangan untuk operasional perusahaan terutama bagi usaha

dengan skala mikro. Selain itu, beberapa pelaku UMKM juga menyatakan bahwa bukan hanya kemampuan adopsi mereka saja yang menjadi faktor kurangnya penggunaan teknologi keuangan, namun juga karena pemikiran mereka yang menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi keuangan itu sangat sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya. Sehingga ini membuat UMKM lebih memilih menggunakan pencatatan keuangan secara manual karena lebih mereka pahami. Permasalahan yang mereka hadapi ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang mereka jalankan dan kinerja keuangan di dalamnya. Dengan semakin banyaknya permasalahan yang terjadi di usaha mereka maka para pelaku UMKM akan semakin kesulitan mencapai tujuan yang mereka inginkan sekaligus menurunkan kinerja keuangan yang mereka miliki.

Kinerja keuangan UMKM ini mengacu pada kemampuan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola sumber daya finansial mereka dan mencapai hasil yang diinginkan dalam hal keuangan. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa UMKM mampu menghasilkan keuntungan yang stabil, mengelola utang dengan baik, dan memiliki posisi keuangan yang kuat (Putri et al., 2023). Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai evaluasi lengkap dari keseluruhan posisi perusahaan dalam kategori seperti aset, kewajiban, ekuitas, biaya, pendapatan, dan profitabilitas usaha secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan ini dijadikan sebagai representasi tentang baik/buruknya ekonomi dan kegiatan yang manajemen perusahaan lakukan untuk kedepannya dalam hal pengembangan dan prospek saham yang menjanjikan. Berdasarkan data LP2M Undiksha tahun 2025, masih banyak didapati UMKM yang mengalami penurunan akan penjualan, laba, hingga

pada keterbatasan kemampuan dalam hal mengelola modal yang digunakan untuk pengembangan usahanya. Kinerja keuangan yang baik dan sehat dapat diukur dengan melihat bagaimana usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang mencerminkan bagaimana keadaan kas atau aset lancar yang dimiliki. Profitabilitas yang didapat juga menjadi faktor utama kinerja keuangan dapat dikatakan sehat atau tidak dengan melihat bagaimana usaha tersebut mampu memanfaatkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan secara optimal. Selain itu, bagaimana cara usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan pinjaman, termasuk dana KUR yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mendukung peningkatan penjualan. Walaupun faktor ini penting untuk diperhatikan, namun beberapa pelaku UMKM hanya berfokus pada keuntungan dan juga bagaimana cara mereka memenuhi kewajibannya saja tanpa memperhatikan pengelolaan sumber daya yang mereka miliki, ini terjadi karena kurangnya kemampuan dalam mengelola dana dan kurangnya wawasan akan kejadian yang tidak terduga sehingga mempengaruhi kinerja keuangan dari UMKM itu sendiri. Penurunan kinerja keuangan ini menjadi sinyal bahwa pelaku UMKM memiliki tantangan dalam menjaga keberlanjutan usahanya dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak pelaku UMKM berakhir gulung tikar karena kurangnya kemampuan mereka dalam mengelola keuangan yang dimiliki sehingga menyebabkan ketidakstabilan kinerja keuangan pada usaha tersebut.

Teknologi dan juga kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan sejalan dengan teori RBV yang dikemukakan oleh Birger Wernerfelt dimana teori ini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam

perusahaan tersebut. Sumber daya yang dimaksud dalam teori ini adalah sumber daya yang memiliki karakteristik seperti halnya mampu mendukung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan bagi para pelanggan dengan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kompetitor; jumlah sumber daya yang tersedia terbatas atau langka sehingga tidak mudah ditiru, sumber daya yang dimiliki dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, semakin banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya tertentu, maka semakin berharga sumber daya tersebut; dan yang terakhir sumber daya suatu perusahaan harus memiliki daya tahan (*durability*). Keempat karakteristik dari sumber daya ini mencerminkan bagaimana suatu UMKM haruslah memiliki hal yang mereka gunakan sebagai nilai tambah dalam usaha yang dijalankan seperti halnya teknologi maupun kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu yang nantinya dapat meningkatkan kinerja usaha (Dwi, 2019). Dalam teori ini sumber daya dibedakan menjadi dua yakni sumber daya internal dan eksternal, sumber daya internal dapat berupa modal sendiri dan keuntungan yang didapat, lalu untuk sumber daya eksternal usaha berupa permodalan yang didapatkan dari pihak luar usaha seperti pihak perbankan, pemerintah, serta investor. Saat ini yang sering mengalami permasalahan terhadap UMKM adalah sumber daya eksternal mereka yakni permodalan. Walaupun terdapat permasalahan umum yang sering dihadapi oleh UMKM, seperti rendahnya kualitas produk yang dihasilkan dan manajemen bisnis, hingga keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi yang ada (Yuniarta & Purnamawati, 2024). Namun pada dasarnya sebagian besar diakibatkan karena modal yang mereka miliki. Modal usaha merupakan sumber daya usaha yang diperoleh sebelum atau selama usaha masih berlangsung dalam

bentuk kekayaan pribadi maupun pinjaman pihak lain untuk dipergunakan dalam mempertahankan usaha dan mengembangkan oleh UMKM (Aji & Listyaningrum, 2021). Sebuah usaha perlu modal untuk menjalankan usahanya agar berjalan dan berkembang, ketika modal yang dimiliki tidak sesuai atau tidak benar maka menyebabkan usaha menjadi terkendala yang mengakibatkan terkendalanya usaha yang dijalankan. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Buleleng, dimana para UMKM memiliki permasalahan pada modal yang membuat operasional mereka terkendala. Permasalahan akses modal yang terbatas biasanya diakibatkan karena kurangnya modal yang mereka dapatkan dari investor atau pihak eksternal dan modal pribadi yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM ini harus meminjam atau mengajukan kredit ke bank. (Masdiantini et al., 2023) mengungkapkan bahwa dalam melakukan pinjaman kredit, pihak bank tidak dapat memberikan pinjaman dengan mudah. Hal ini dikarenakan pihak bank haruslah mengetahui apakah pihak debitur bermasalah atau tidak, karena jika debitur memiliki masalah maka dapat meningkatkan potensi kredit macet dan hal lain yang tidak diinginkan. Sehingga hal ini menyebabkan banyak UMKM kesusahan dalam mendapatkan modal dari kredit yang diajukan ke bank, berkaca dari hal ini pemerintah membuat yang namanya Dana KUR dengan tujuan dapat meringankan pengusaha dalam menjalankan usahanya.

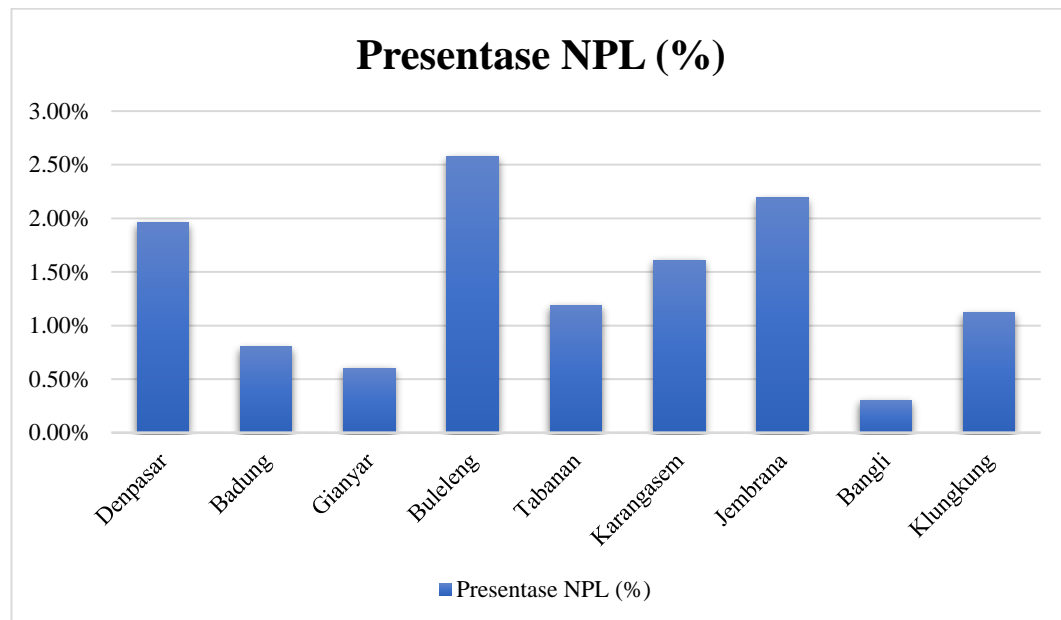
Dana KUR merupakan salah satu penyaluran kredit yang digunakan pemerintah untuk membantu meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dana KUR bertujuan untuk meningkatkan akan pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam hal penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja dalam

meningkatkan pendapatannya pada masyarakat. Pemberian Dana KUR dapat dikatakan sebagai salah satu program pemerintah yang mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, kelompok usaha yang produktif dan layak. Berdasarkan laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dikatakan bahwa kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh sebesar 3,37% (yoy), dimana hingga pada tanggal 31 Agustus 2024, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp195,6 triliun atau sekitar 69,86 persen dari target yang ditetapkan dengan penyaluran kreditnya sudah mencapai 3,32 juta debitur (Bank Indonesia, 2025). Peningkatan akan pinjaman kredit ini juga terlihat dari data yang ada pada Statistik LPBB yang dikeluarkan oleh OJK bahwa akumulasi data rekening penerima kredit pinjaman per tahun 2024 mencapai 1.518.782 akun di Bali. Sedangkan pada wilayah Kabupaten Buleleng, berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, bahwa per tahun 2023 banyaknya pelaku UMKM yang menggunakan Dana KUR sebagai modal usaha yang mereka jalankan sejumlah 7.100 nama yang sudah terdaftar sebagai penerima Dana KUR.

Pengelolaan Dana KUR tidak dapat dipandang hanya sebatas pada proses penyaluran kredit dari pemerintah melalui bank kepada pelaku UMKM, tetapi juga dalam hal perencanaan, pemanfaatan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana tersebut. Dalam teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (1984), hal ini penting karena setiap tahap pengelolaan Dana KUR melibatkan kepentingan berbagai pihak yang saling terkait dan

membutuhkan keseimbangan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal sekaligus menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun perkembangan akan pemberian kredit yang diberikan oleh pemerintah ke pelaku UMKM terus meningkat, hal ini ditandai dengan peningkatan penyaluran kredit tiap kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Walaupun pemerintah sudah menjadikan dana KUR ini sebagai salah satu program kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang diperuntukkan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) di bidang usaha produktif dan layak (Sujarweni, 2015). Namun masih didapati adanya beberapa permasalahan di dalam program ini, seperti halnya pelaku UMKM yang tidak bisa membayar kredit sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau kredit macet. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) di tiap tahunnya, terutama pada tahun 2024. Pada tahun 2024 tingkat NPL di Provinsi Bali pada triwulan keempat mencapai 1,45%, yang dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan triwulan ketiga yakni mencapai 1,92%. Walaupun NPL dapat ditekan namun tetap saja Kabupaten Buleleng memiliki tingkat NPL yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yakni mencapai 2,58%. Hal ini terjadi karena beberapa hal, seperti tidak adanya pemisahan uang pribadi dengan modal usaha sehingga mengakibatkan modal yang seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha akan habis karena perilaku konsumtif pelaku UMKM yang berujung pada tidak bisa membayar kredit yang mereka dapatkan dari pihak bank atau pemerintah. Sehingga sudah tentu perlu adanya perbaikan akan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan kredit secara lebih efektif lagi untuk menekan tingkat NPL sekaligus meminimalisir

terjadinya pelaku UMKM yang mengalami kebangkrutan akibat ketidakmampuan mereka untuk melunasi kredit yang diberikan.



Gambar 1. 1
Tingkat NPL Tiap Kabupaten
(Sumber: Bank Indonesia, 2024)

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pemberian KUR kepada pelaku UMKM dalam hal pengembangan usahanya sangat berpengaruh signifikan terhadap keuntungan yang mereka dapatkan sehingga ini dapat meningkatkan kualitas dari kinerja keuangan dari usaha itu sendiri, tidak hanya berlaku secara umum namun ini juga berlaku secara spesifik terutama di wilayah Kabupaten Buleleng dimana penggunaan kur sangat mempengaruhi kinerja keuangan UMKM yang dapat mempengaruhi kelanjutan dari usaha yang dijalankan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlu adanya kemampuan dari pelaku UMKM untuk dapat mengelola kredit yang mereka dapatkan sebagai modal dalam menjalankan usaha, mulai dari perencanaan hingga membuat keputusan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka dan sekaligus dapat menekan angka kredit

macet atau NPL kabupaten yang hingga kini terus meningkat. Permasalahan lain yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kesulitan dalam mengakses atau mengajukan Dana KUR. Beberapa pelaku UMKM kesulitan dalam mengajukan Dana KUR karena berbagai macam faktor terutama banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang mengajukan. Sehingga ini yang menyebabkan para pelaku UMKM masih merasa kesusahan untuk mendapatkan modal yang nantinya digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan usahanya.

Saat ini perkembangan perekonomian di Kabupaten Buleleng sangat sejalan dengan perkembangan teknologi keuangan di tiap tahunnya dengan berbagai inovasi yang ada. Di Kabupaten Buleleng, *FinTech* sudah berkembang dari beberapa tahun yang lalu, hal ini terjadi karena pada industri keuangan tradisional terdapat hal-hal yang menjadi kesulitan bagi masyarakat seperti halnya perbankan yang sangat terikat dengan aturan ketat, daerah tertentu yang masih belum terjangkau perbankan tradisional. Hadirnya *FinTech* bagi pelaku UMKM memberikan berbagai kemudahan, seperti halnya mudah dalam mengajukan pinjaman berupa dana KUR kepada pihak bank tanpa harus datang ke bank konvensional dan pelaku UMKM yang menggunakan *FinTech* ini juga dapat melakukan transaksi secara lebih cepat dan fleksibel. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan pertumbuhan *FinTech* yang semakin pesat, tentu akan menuntut para pelaku UMKM untuk dapat mengelola produk dan usahanya dengan cara yang lebih kreatif, efektif dan efisien, maka dari itu sangat diperlukan yang namanya pelatihan dan pendampingan keterampilan dalam mengelola usaha dengan berbasis digital (Masdiantini et al., 2022). Adanya pemanfaatan teknologi oleh UMKM ini dapat meningkatkan keberlanjutan dan

pertumbuhan usahanya, seperti, peningkatan profitabilitas dan permintaan produk, meningkatnya efektivitas operasional pada usaha yang dijalankan, serta membantu UMKM untuk memperoleh modal kerja, melakukan transaksi secara cepat, hingga mengelola keuangan secara daring tanpa harus bergantung pada lembaga perbankan formal. Kehadiran *FinTech* diyakini mampu memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau UMKM kecil yang belum tersentuh layanan perbankan. Namun, kenyataannya pemanfaatan *FinTech* di kalangan UMKM, khususnya di Kabupaten Buleleng, masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi keuangan dan digital, kurangnya kepercayaan terhadap sistem digital, serta kekhawatiran terhadap keamanan data dan potensi penipuan. Kondisi tersebut menyebabkan *FinTech* belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pembiayaan produktif yang berpotensi meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Fitrianita dan Sinarwati tahun 2024, dengan judul penelitiannya “Pengaruh Literasi Keuangan, Teknologi Keuangan Dan Modal Usaha Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Di Kabupaten Karangasem.” Dinyatakan bahwa *FinTech* atau teknologi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Sedangkan pada penelitian lainnya dikatakan bahwa *FinTech* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM (Kusnandar, 2022). Perbedaan pernyataan hasil penelitian ini yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah variabel *FinTech* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM

Selain pendanaan, faktor psikologis UMKM juga menjadi peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan dan menentukan arah perkembangan usaha.

Dalam operasional UMKM sudah tentu perlu adanya pengambilan keputusan akan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pengambilan keputusan ini haruslah didasarkan pada kinerja keuangan yang dimiliki sehingga nantinya keputusan yang diambil sudah sesuai dengan yang ingin dicapai. Pengambilan keputusan sangatlah penting dalam sebuah usaha dan harus dilakukan dengan rasa percaya diri untuk meyakinkan bahwa keputusan yang diambil sudah yang terbaik. Namun masih terdapat sebagian UMKM yang ragu dan tidak percaya diri akan keputusan yang mereka ambil. Keraguan atau kecemasan yang dialami oleh pelaku UMKM ini terjadi akibat dari kondisi keuangan mereka dan pengalaman yang dimiliki. Sehingga hal ini patut mendapat perhatian lebih besar karena merupakan faktor risiko dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang mereka miliki dan kelanjutan usaha yang dijalankan (Lee et al., 2023). Pengambilan keputusan dalam usaha ini, sering disebut juga dengan istilah *Financial Self-Efficacy*. *Financial Self-Efficacy* atau yang lebih dikenal dengan efikasi diri ini, lebih mengacu pada kepercayaan diri seseorang untuk mencapai tujuan finansial. Kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki, dapat dijadikan sebagai suatu dorongan bagi para pelaku UMKM untuk mencari cara baru demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu bentuk dari kepercayaan diri tersebut adalah minat UMKM dalam mengajukan pinjaman dana sebagai tambahan modal usaha. Dengan memanfaatkan pinjaman secara bijaksana, UMKM dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Pelaku UMKM membutuhkan efikasi diri untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan usahanya agar memiliki daya saing terhadap pasar.

UMKM dengan tingkat *Financial Self-Efficacy* yang tinggi cenderung lebih percaya diri dalam mengelola sumber daya keuangan, lebih disiplin dalam pencatatan transaksi, serta lebih berani dalam mengambil peluang bisnis. Sebaliknya, jika tingkat *Financial Self-Efficacy* yang rendah dapat menyebabkan keraguan suatu usaha dalam mengambil keputusan finansial, sehingga berpengaruh negatif terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan usaha. Dengan demikian, *Financial Self-Efficacy* bukan hanya mempengaruhi cara berpikir UMKM terhadap risiko dan peluang, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas pengelolaan modal dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Selain itu, kemampuan mengelola dana usaha juga menjadi salah satu faktor fundamental yang menentukan kinerja keuangan UMKM. Kemampuan ini mencakup bagaimana UMKM dapat mengalokasikan, menggunakan, serta mengontrol dana yang dimiliki agar menghasilkan keuntungan optimal. Ketidakmampuan dalam mengelola dana sering kali menjadi penyebab utama menurunnya profitabilitas, terhambatnya operasional, hingga kegagalan usaha. Sebaliknya, UMKM yang mampu mengatur keuangan dengan baik akan memiliki likuiditas yang sehat, perputaran modal yang efisien, serta kemampuan untuk melakukan investasi kembali ke dalam usaha. Dengan demikian, kemampuan mengelola dana berperan langsung dalam menciptakan stabilitas finansial dan meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa keyakinan akan kemampuan yang dimiliki oleh suatu individu dalam mengelola keuangan dapat mempengaruhi bagaimana individu tersebut dalam berperilaku secara finansial.

Pada penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Wijayana, Muhdiyanto, dan Utami (2023) bahwa *Financial Self-Efficacy* memiliki pengaruh positif terhadap

kinerja keuangan UMKM, sedangkan pada penelitian lainnya yang diungkapkan oleh (Asmin et al., 2021) dengan judul “Perilaku Keuangan, *Financial Self-Efficacy* dan Keterampilan Wirausaha terhadap Kinerja Keuangan UKM Fashion dan Kuliner” didapati bahwa dalam hasil penelitiannya variabel *Financial Self-Efficacy* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di sektor *fashion* dan kuliner sehingga perbedaan ini menjadikan diperlukannya penelitian lebih lanjut lagi untuk mengetahui dan mengkonfirmasi apakah *Financial Self-Efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Perbedaan hasil penelitian ini yang menjadikan penulis untuk melakukan penelitian lanjutan yang bertujuan untuk menganalisis sekaligus membuktikan apakah variabel, *FinTech*, *Financial Self-Efficacy*, dan Penggunaan Dana KUR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dalam lingkup UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang di atas, maka sejumlah permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami masalah dalam kinerja keuangan yang sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan keberlangsungan usaha kedepannya. Ini ditandai dengan adanya tingkat penurunan penjualan, keuntungan, hingga kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola sumber kredit yang didapatkan.
2. Beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang masih kurang memahami bagaimana kegunaan dari *FinTech* baik sebagai media transaksi,

pembukuan, hingga pembuat keputusan finansial. Para pelaku UMKM ini biasanya lebih mengandalkan ingatan dan nota-nota yang ada sehingga ini menyebabkan risiko akan kehilangan dan kekeliruan akan transaksi yang dilakukan.

3. Kurangnya kemampuan UMKM dalam melakukan keputusan finansial yang nantinya sangat mempengaruhi kinerja dari usaha yang dijalankan, karena kurangnya kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menyikapi dan memutuskan keadaan keuangan yang mereka miliki.
4. Pelaku UMKM memiliki masalah dalam hal pengelolaan modal yang mereka dapatkan dari pemerintah, yang disebabkan karena adanya penggunaan modal usaha untuk kepentingan pribadi dan tidak adanya pencatatan keuangan dari dana kredit yang diterima. Sehingga menyebabkan semakin tingginya tingkat kredit macet karena kurangnya dana dalam mengelola usahanya.

1.3 Pembatasan Masalah

Guna untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas pada permasalahan yang lain maka penulis memfokuskan permasalahan utama penelitian ini agar mencapai dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Batasan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah pemfokusan pengaruh *FinTech*, *Financial Self-Efficacy*, dan Pengelolaan dana KUR terhadap kinerja keuangan UMKM pada lingkup wilayah Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *FinTech* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM?
2. Apakah *Financial Self-Efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM?
3. Apakah Pengelolaan Dana KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada ulasan masalah di atas, maka fokus permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. *FinTech* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM
2. *Financial Self-Efficacy* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM
3. Pengelolaan Dana KUR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM



1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, kontribusi atau manfaat yang diharapkan dari hasil studi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas kajian akuntansi keuangan dengan menghadirkan perspektif baru terkait bagaimana inovasi keuangan digital (*FinTech*), kepercayaan diri dalam mengelola keuangan (*Financial Self-Efficacy*), serta Pengelolaan Dana KUR dapat memengaruhi kinerja keuangan UMKM. penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas literatur akuntansi keuangan dari sisi praktik pelaporan, pengelolaan keuangan pada entitas kecil dan menengah yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi finansial, sekaligus menjadi pengembangan dalam hal literatur keuangan inklusif melalui analisis peran *FinTech* dan Dana KUR sebagai instrumen yang mendorong akses keuangan yang lebih merata bagi pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pelaku UMKM, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan dengan sumber daya yang dimiliki oleh UMKM, serta dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya teknologi dan mampu untuk membuat keputusan atas keuangan yang dapat berpengaruh terhadap usaha yang mereka jalankan nantinya.
- b) Bagi Mahasiswa, diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan terkait matakuliah yang dipelajari selama masa perkuliahan di

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha, seperti Sistem Informasi Keuangan, Manajemen Keuangan dan matakuliah lainnya yang masih ada dalam lingkup akuntansi keuangan yang selama ini telah diperoleh selama masa perkuliahan, selain itu diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik terkait.

- c) Bagi Lembaga Perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perbankan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran Dana KUR serta memperluas kerja sama dengan penyedia layanan *FinTech*.

